

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/337076733>

ANALISIS PANDANGAN COMMONPLACES KURIKULUM JOSEPH SCHWAB DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Nurul Febrianti

Conference Paper · January 2018

CITATIONS

0

READS

538

1 author:



Nurul Febrianti

Universitas Esa Unggul

4 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



ANALISIS PANDANGAN COMMONPLACES KURIKULUM JOSEPH SCHWAB DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN [View project](#)

ANALISIS PANDANGAN *COMMONPLACES* KURIKULUM JOSEPH SCHWAB DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Nurul Febrianti

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Universitas Esa Unggul

Email: nurul.febrianti@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan. Kurikulum bukan hanya sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, namun lebih dari pada itu, kurikulum merupakan ruh dalam pendidikan. Perubahan kurikulum tidak bisa dihindari dan akan terus terjadi. Indonesia mengalami perubahan kurikulum dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu berupaya untuk memperbaiki pendidikan dari segi kurikulum. Permasalahan kurikulum 2013 yang sampai saat ini masih belum mendapatkan titik terang tentu menjadi pertanyaan besar. Hal apa yang menyebabkan kurikulum 2013 sampai sekarang masih sepenuhnya tidak dijalankan utuh secara nasional. Salah satu aspek penilaian pada Kurikulum 2013 yakni sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku siswa sering dikaitkan dengan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada perilaku baik siswa. Joseph Schwab mengkritisi aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan kurikulum yang disebut 'commonplaces'. Commonplaces tersebut diharapkan dapat menjadikan acuan sesuai dengan capaian pembelajaran. Komponen commonplaces terdiri dari guru, pembelajar atau siswa, materi pelajaran, konteks dan pembuatan kurikulum.

Kata Kunci: kurikulum, pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan.

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan kata kurikulum sudah tidak asing didengar. Menurut KBBI yang dimaksud dengan kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Kurikulum menjadi komponen yang begitu penting karena dengan adanya kurikulum kegiatan dalam belajar mengajar menjadi jelas sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Menurut Farisi kurikulum sebagai salah satu komponen penting pendidikan nasional yang bernilai strategis, karena secara substantif kurikulum merupakan bentuk akuntabilitas pendidikan terhadap masyarakat, baik dalam bentuk "*academic accountability*" maupun "*legal accountability*" (Farisi, 2012). Namun, permasalahan tentang kurikulum selalu menarik perhatian untuk dikaji. Perubahan kurikulum yang terjadi selalu diiringi dengan perkembangan jaman, karena kurikulum tahun 2006 belum tentu cocok dengan siswa ditahun 2018. Sayangnya yang terjadi di Indonesia sering kita mendengar ungkapan "ganti menteri = ganti kurikulum". Ungkapan ini merujuk pada berbagai kebijakan mengenai kurikulum yang sering berubah di Indonesia. Sebenarnya, perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan, mengingat perubahan-perubahan sosial-politik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat. Sayangnya perubahan kebijakan pendidikan seringkali, untuk tidak mengatakan selalu, tidak diimbangi dengan kebijakan implementasi yang jelas. Bila kita menengok sejarah pendidikan kita, telah banyak perubahan kurikulum dilakukan dengan menggunakan pola-pola yang berbeda. Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia adalah:

- 1) Kurikulum berorientasi mata pelajaran
- 2) Kurikulum CBSA (*Active Learning*)
- 3) Kurikulum berorientasi tujuan (+ muatan lokal)
- 4) Kurikulum berorientasi kompetensi (KBK)
- 5) Kurikulum berorientasi independensi lembaga pendidikan (KTSP)
- 6) Kurikulum Tahun 2013

Keenam kurikulum tersebut diberlakukan atas dasar kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Sayangnya, sebagaimana disinggung diatas, kebijakan-kebijakan tersebut gagal karena dua hal: Pertama, tidak ada kebijakan implemementasi yang jelas. Kedua, lembaga-lembaga pendidikan, termasuk guru, tidak dipersiapkan untuk menterjemahkan kebijakan itu dalam tataran praktis yang tepat.

Joseph Schwab seorang pakar kurikulum menjelaskan terdapat tiga poin dalam permasalahan kurikulum. Pertama, bahwa bidang kurikulum hampir mati, tidak mampu dengan metode dan prinsipnya yang sekarang untuk melanjutkan pekerjaannya dan mati-matian mencari prinsip dan metode baru yang lebih efektif. Kedua, bidang kurikulum telah mencapai hal yang tidak menyenangkan ini menyatakan dengan ketergantungan yang tidak lazim pada teori di suatu daerah di mana teori sebagian tidak pantas di tempat pertama. Ketiga, akan ada kebangkitan kembali dari bidang kurikulum, jika sebagian besar energi kurikulum dialihkan dari teori ke praktis, ke semu praktis dan eklektik.

Berdasarkan penjelasan menurut pandangan Schwab, maka kurikulum harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan di masa sekarang dan juga harus sesuai dengan lingkungan (negara) sosial, kultur, budaya, agama, dsb. Implementasi kurikulum adalah bagian yang paling menentukan dalam siklus kurikulum. Ini karena seringkali kegagalan kebijakan pendidikan yang menyangkut kurikulum terjadi bukan karena tidak tepatnya kebijakan yang dikeluarkan, melainkan implementasinya yang tidak tepat. Oleh karena itu, sebaik apapun kurikulum dirumuskan, tentu tidak akan bermakna apapun bila implementasinya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Banyak orang beranggapan bahwa implementasi kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan kurikulum, karenanya tidak perlu diperhatikan secara khusus. Padahal, implementasi kurikulum, terlebih sebuah kurikulum baru, memerlukan berbagai pra-kondisi baik teknis maupun non-teknis yang sangat menentukan bagi sukses atau tidaknya sebuah kurikulum. Dalambanyak kasus, implementasi kurikulum menghendaki adanya perubahan pemahaman, kemampuan dan pola hubungan di lembaga-lembaga pendidikan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kurikulum

Kurikulum.

Dalam pandangan Joseph Schwab mengenai kurikulum aspek yang paling penting dari Schwab adalah diskusi tentang musyawarah. Dia ingin *curriculumists* untuk menjadi pendidik, bukan hanya ahli yang memahami kurikulum, misalnya, bagaimana anak-anak belajar. Menurut Schwab bahwa:

“Musyawarah adalah kompleks dan sulit. Ini memperlakukan keduanya tujuan dan sarana dan harus memperlakukan mereka sebagai saling menentukan satu sama lain. Ini harus mencoba untuk mengidentifikasi, sehubungan dengan baik, apa fakta-fakta mungkin relevan. Ini harus mencoba untuk memastikan fakta yang relevan dalam kasus konkret. Ini harus mencoba untuk mengidentifikasi desiderata dalam kasus ini. Ini harus menghasilkan solusi alternatif. Kemudian harus mempertimbangkan alternatif dan biaya dan konsekuensi mereka terhadap satu sama lain dan memilih, bukan alternatif yang tepat, karena tidak ada hal seperti itu, tapi yang terbaik”.

Musyawarah berarti menggunakan kemampuan penalaran kita untuk membayangkan alternatif yang akan memindahkan suatu keadaan ke arah yang kita inginkan untuk pergi. Di tangan Schwab, musyawarah adalah aktivitas manusia yang sangat menerima kenyataan bahwa pembuatan kurikulum terjadi di dalam dunia yang tidak sempurna. Tidak akan pernah ada kurikulum yang sempurna atau guru yang sempurna. Itu tidak berarti, bagaimanapun, bahwa guru dan pembuat kurikulum berhenti berusaha menuju kesempurnaan (Null, 2011: 26-28).

B. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran atau mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh siswa ataupun mahasiswa di sekolah atau di perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Winataputra (2012: 2) bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas yakni sebagai wahana pendidikan yang dibangun untuk membina dan mengembangkan warga negara yang cerdas baik dalam latar subsistem pendidikan formal, nonformal dan informal, pada dasarnya sudah menjadi bagian inheren dari idea, instrumentasi dan praksis pendidikan nasional Indonesia.”

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan bagi warga negara agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik yang secara legal formal telah diimplementasikan di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik, cerdas, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dasar negara yaitu Pancasila. Selanjutnya Pendidikan Kewarganegaraan atau civic/citizenship education secara substansif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan kompetensi warga negara yang baik, cerdas, dan bertanggung jawab dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari dua kata yaitu Pendidikan dan Kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Berdasarkan landasan di atas menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan pemerintah agar warga negaranya secara khusus peserta didik dapan mengembangkan potensi dirinya demi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Bunyamin Maftuh – Sapriya (2005: 321) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yaitu:

“Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan atau mata pelajaran yang memiliki tujuan utama untuk mendidik siswa agar menjadi warga negara yang baik, demokratis dan bertanggung jawab. Program Pendidikan Kewarganegaraan ini memandang siswa dalam kedudukannya sebagai warga negara, sehingga program-program, kompetensi atau materi yang diberikan kepada peserta didik diarahkan untuk mempersiapkan mereka mampu

hidup secara fungsional sebagai warga negara masyarakat dan warga negara yang baik.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan utama yakni mendidik siswa agar menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab dan cerdas sehingga nanti mampu hidup menjadi warga negara yang baik. Hal tersebut sejalan dengan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 (2006: 45) secara normatif dikemukakan bahwa:

“Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.”

Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan nasional Indonesia yang membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, dan menumbuhkan warga negara Indonesia yang baik yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya Zamroni (2007: 137) mengatakan bahwa:

“Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan proses mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge*, *awareness*, *attitude*, *political efficacy*, dan *political participation*, serta kemampuan untuk mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menjadikan seseorang memiliki *political knowledge*, *awareness*, *attitude*, *political efficacy*, dan *political participation*, serta kemampuan untuk mengambil keputusan politik secara rasional yang nantinya dapat diimplementasikan di dunia nyata.

C. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Behaviorisme merupakan teori belajar tentang perubahan tingkah laku. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Hal yang sama berlaku pada pembelajaran PKn. Mahasiswa atau peserta didik diberikan stimulus berupa materi, metode, media, sumber dan evaluasi hingga akan menimbulkan respon berupa sikap atau perubahan tingkah laku.

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Belajar menurut Gagne (1977) dalam Komalasari (2013: 2) menyatakan bahwa:

“Belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis *performance* (kinerja).”

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa belajar merupakan proses yang dapat merubah manusia dari aspek sikap, minat, nilai, maupun perubahan kemampuan yang dapat meningkatkan kualitas kerja seseorang. Selanjutnya, pembelajaran menurut Komalasari (2013: 3) mendefinisikan bahwa:

“Pembelajaran sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek atau peserta didik/ pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis subjek didik/ pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.”

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pembelajaran merupakan sistem atau proses yang memberikan pelajaran pada peserta didik yang telah direncanakan atau didesain oleh pengajar dan diimplementasikan serta dievaluasi secara sistematis agar mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Senada dengan pendapat tersebut Hamalik (2003) dalam Sanjaya (2013: 6) mengemukakan sistem pembelajaran adalah suatu unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Knirk dan Gustafon (1986: 15) pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan sudah melalui tahapan perancangan pembelajaran.

Dengan demikian, pembelajaran dapat meliputi segala pengalaman yang diaplikasikan guru kepada peserta didik di dalam kelas. Makin intensif pengalaman yang dihayati peserta didik maka kualitas pembelajarannya pun semakin tinggi. Intensitas pengalaman belajar ini dapat dilihat dari tingginya keterlibatan siswa dalam proses belajar, baik di kelas maupun di luar kelas. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan dalam Pancasila dan UU NRI 1945.”

Berdasarkan dari pengertian pembelajaran dan Pendidikan Kewarganegaraan di atas maka, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai interaksi antara guru dan siswa berupa pemindahan sejumlah bahan kajian mengenai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Proses pembelajaran memuat beberapa komponen penunjang yang menuntut organisasi, pengelolaan dan hasil. Komponen tersebut saling terkait, saling membantu, dan merupakan satu kesatuan komponen-komponen proses pembelajaran tersebut antara lain:

- a) Siswa: Proses pembelajaran mengarahkan siswa agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b) Tujuan: Indikator keberhasilan pembelajaran yang pada hakikatnya adalah hasil belajar yang diinginkan.
- c) Kondisi: pengalaman belajar yang dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan khusus seperti yang telah dirumuskan.
- d) Sumber-sumber belajar: segala sesuatu yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar.
- e) Hasil belajar atau evaluasi: suatu alat yang berperan sebagai alat untuk mengukur tercapai atau tidaknya. (Sanjaya, 2013: 9-13).

Sebelum sampai pada kegiatan belajar, terlebih seorang pendidik atau guru harus menyusun rencana kegiatan belajar mengajar. Dalam membuat perencanaan tersebut guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan pencapaian aspek tujuan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk sekolah menengah atas. Agar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak menyimpang dari hakikatnya dan mudah dipahami serta dipelajari oleh guru dan siswa, para ahli menyarankan agar konsep-konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan dipahami benar oleh guru dan siswa.

Uraian diatas menegaskan bahwa untuk dapat mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan sangat diperlukan memahami konsep-konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satu mencapai hal tersebut adalah dengan melibatkan langsung siswa dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam makalah ini menggunakan metode *study literature* ataupun kajian teoritik, yaitu memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan judul makalah yang dibuat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam buku yang ditulis oleh Wesley Null, menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Joseph Schwab menantang konsep kurikulum yang selama ini kurikulis ciptakan. Schwab mengatakan bahwa kurikulum adalah sesuatu yang berdasarkan praktik moral dan bukan berdasarkan ilmu teori. Selanjutnya Schwab mengacu kepada lima faktor sebagai *commonplaces*, Ia berpendapat bahwa lima *commonplaces* adalah penting jika ingin upaya reformasi kurikulum yang diharapkan berhasil.

Sebelum menjabarkan lebih panjang tentang *commonplaces* yang digagas oleh Schwab, mari kita lihat dulu pengertian dari *commonplaces*. Schwab memilih term *commonplaces* karena menurut Ia menghubungkan kurikulum sangat berbeda dari apa yang mendominasi bidang selama ini. Dia menggambarkan pada subjek retorika, sedangkan teori kurikulum dan pengembangan kurikulum hampir selalu memanfaatkan ilmu alam dan psikologi perilaku untuk bimbingan. Istilah *commonplaces* berasal dari Bahasa Latin yakni *locus communis*. *Communis* adalah serupa dengan komunitas, jadi ide dari *commonplace* adalah sebuah kata, prasa, atau ide yang biasa diterima sebagai sesuatu yang benar, atau “masuk akal”, di seluruh komunitas.

Sebuah *commonplace* adalah sesuatu yang semua orang dapat terima sebagai suatu yang benar. *Commonplaces* ini sulit untuk disanggah karena mereka beroperasi pada tingkat asumsi yang diterima secara luas sebagai infalibel. Selanjutnya Schwab menambahkan bahwa *commonplaces* ini sangat kuat karena setiap *commonplace* diterima sebagai bagian yang benar dari kurikulum yang bagus. Terdapat lima *commonplaces* yang dimaksud Schwab yakni, guru, pembelajar, materi pelajaran, konteks, dan pembuatan kurikulum.

Seluruh mata pelajaran pasti dapat dikaitkan dengan *commonplaces* yang dicetuskan oleh Schwab, tidak terkecuali Pendidikan Kewarganegaraan. Setelah ini kita akan membedah pengertian setiap *commonplaces* tersebut dan akan mengaitkan kelima *commonplaces* (guru, pembelajar, materi pelajaran, konteks, dan pembuatan kurikulum) terhadap PKn di Indonesia.

a) Guru (*Teachers*)

Guru merupakan kekuatan sentral dalam kurikulum itu sudah pasti. Tidak dapat kurikulum diajarkan tanpa peran seorang guru. Menurut Schwab dalam Null (2011) guru adalah agen yang secara resmi (tidak resmi) mengambil kurikulum dan menyajikan itu kepada murid dalam kelas yang spesifik. Guru atau pendidik menjadi faktor penting dalam berjalannya proses pembelajaran. Guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Sehingga guru

merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Bila berbicara tentang guru mungkin tidak akan habis dibahas, namun dalam kajian kali ini hanya dibatasi dengan bagian guru yang manakah yang menjadi hambatan pencapaian keberhasilan tujuan PKn Indonesia?

Guru Pendidikan Kewarganegaraan selalu dijadikan „kambing hitam“ saat siswa berperilaku tidak baik atau tidak tertib. Guru PKn mendapatkan stigma bahwa harus dapat merubah anak menjadi anak yang baik dalam bersikap dan berperilaku. Semestinya tugas semua guru, apa pun mata pelajaran yang diajarkan wajib secara moril membentuk perilaku anak menjadi anak yang baik.

Pada perkuliahan, Prof. Nu‘man Somantri mengatakan bahwa seorang guru seharusnya memiliki “*well dedicated and well inform*”. Maksud dari kalimat tersebut adalah guru harus memiliki dedikasi yang tinggi dan memberikan informasi yang benar kepada murid. Guru juga tidak boleh berpihak, dengan kata lain guru harus bersikap netral.

b) *Pembelajar (Leaners)*

Commonplaces berikutnya adalah pembelajar. Schwab menggunakan kata „pembelajar“ bukan „murid“ atau „siswa“. Menurut Schwab penggunaan kata „pembelajar“ berarti lebih dari „siswa“ yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Schwab menegaskan jika yang membuat kurikulum mengabaikan kebutuhan, ketertarikan, dan latar belakang dari siswa, maka kurikulum, yang mereka berikan tidak akan berdampak apapun.

Selanjutnya mari kita kaitkan dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pembelajar atau siswa di sekolah. Tujuan utama dari pembelajaran PKn adalah perilaku warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam proses pembelajaran sering ditemukan bahwa siswa menganggap PKn adalah mata pelajaran yang membosankan karena berbentuk hafalan-hafalan yang mereka harus pahami. Stereotypes tentang mata pelajaran PKn yang selama ini berkembang harus dipatahkan, sehingga siswa dapat tertarik dengan mata pelajaran ini. Apa yang harus dilakukan? Tentu semua komponen atau *commonplace* yang digagas Schwab harus saling bekerjasama. Guru yang kreatif, siswa yang aktif, materi pelajaran dan kurikulum yang inovatif.

c) *Materi Pelajaran (Subject Matter)*

Materi pelajaran juga merupakan esensial dari kurikulum. Guru mengajar „sesuatu“ kepada siswa, maka ini harus dipersiapkan secara matang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar apa yang ingin dicapai pada suatu proses pembelajaran. Melihat materi pelajaran PKn sekarang ini masih banyak didiskusikan oleh para pembuat kurikulum. Banyak yang beranggapan bahwa materi pelajaran PKn hanya bersifat hafalan dan terlalu sulit, sehingga membuat peserta didik tidak tertarik pada mata pelajaran PKn. Kita ambil contoh materi pelajaran di tingkat Sekolah Dasar, pada tingkat SD materi pelajaran PKn terlalu sulit dengan contoh BAB tentang harus hafalnya peserta didik tentang “Tugas Lurah dan Camat” yang masuk dalam SK “Memahami Sistem Pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi”. Menurut pandangan saya, materi pelajaran PKn harus lebih memfokuskan pada sikap dan perilaku karena goals dari pembelajaran PKn adalah menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Selanjutnya untuk tingkat sekolah dasar yang peserta didik masih dalam tahan berpikir Operasional Kongkrit harus diberikan pembelajaran yang lebih kontekstual, yang bukan terlalu banyak teori dan hafalan.

d) *Konteks (Context)*

Commonplaces berikutnya menurut Schwab adalah Konteks. Maksud dari konteks di sini adalah mengacu pada pengaturan di mana kurikulum diajarkan. Selanjutnya penjelasan Schwab tentang konteks adalah komunitas yang lebih besar di mana sekolah tertentu ada. Contohnya, konteks memunculkan pertanyaan tentang sejarah dari komunitas tersebut, lingkungan sekolah itu berada, dan kawasan sekolah. Schwab menambahkan bahwa salah satu hambatan dalam berjalannya kurikulum secara baik adalah penekanan yang berlebihan pada konteks juga dapat mengarah pada reproduksi hambatan saat ini yang ada dalam suatu komunitas (apakah mereka didasarkan pada ras, kelas, atau jenis kelamin) tanpa ada upaya untuk mematahkannya.

Indonesia merupakan negara yang multietnis, multikultur, dan heterogen. Kelas maupun sekolah sudah barang pasti juga memiliki kultur yang heterogen, setiap siswa memiliki *background* berbeda-beda. Ini merupakan tantangan terutama dalam pembelajaran PKn yang memberikan pengajaran tentang tenggang rasa, demokrasi, saling menghargai.

e) *Pembuatan Kurikulum (Curriculum Making)*

Terakhir dari gagasan *commonplaces* dalam kurikulum yang digagas oleh Schwab yakni pembuatan kurikulum itu sendiri. Dalam pembuatan kurikulum menurut Schwab terdapat tiga dimensi yang esensial yakni: practice, purpose, and integration. Pembuatan kurikulum harus dipraktekkan sehingga bukan hanya rencana semata, kurikulum juga seharusnya memiliki tujuan dan kegunaan yang jelas dalam pebuatannya, dan kurikulum harus terintegrasi dari semua *commonplaces* yang sudah dijelaskan di atas. Keseluruhan *commoplaces* yang digagas oleh Schwab haruslah saling bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya.

Lalu bagaimana dengan pembuatan kurikulum khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan? Kita tidak bisa menghindari seringnya perubahan kurikulum yang dialami dunia pendidikan di Indonesia, namun itu hal yang wajar karena kurikulum bersifat fleksible, yang selalu

mengikuti perkembangan jaman. Namun hal ini juga menjadi hambatan bagi pelaksana kurikulum, dalam hal ini seperti guru dan siswa yang langsung merasakan dampak kebijakan perubahan kurikulum. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sering berubah-ubah, sejak awal kemerdekaan pada tahun 1957 hingga saat ini yang terbaru Kurikulum 2013. Perubahan nama yang selalu menghiasi PKn seperti Civic, Kewargaannegara, Pendidikan Nilai Moral, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun isi atau content tidak terlalu jauh berbeda, namun bagi sebagian orang berpandangan mata pelajaran PKn mata pelajaran yang masih sering berubah-ubah dalam segi penamaan.

Kurikulum Pendidikan kewarganegaraan jika dikaitkan dengan gagasan yang dinyatakan oleh Schwab tentang tiga dimensi penting dalam pembuatan kurikulum yakni praktek, tujuan atau kegunaan, dan integrasi maka kurikulum PKn masih ditemukan beberapa hambatan. Pertama, dimensi praktek. Dalam prakteknya kurikulum PKn yang sedang dilakukan kini masih belum sempurna, banyak sekolah yang melakukan Kurikulum 2013 yang dicanangkan oleh Pemerintah. Ini jelas karena kesiapan sekolah, guru, bahan ajar yang masih kurang untuk mempraktekkan kurikulum 2013 secara keseluruhan. Kedua, dimensi tujuan atau kegunaan.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk perilaku warga negara yang cerdas dan baik nantinya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tentu hal ini selalu menjadi PR bagi guru PKn agar dapat bisa membentuk perilaku warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, yang cinta tanah air dan rela berkorban. Ketiga yakni integrasi. Seluruh komponen *commonplaces* dalam PKn harus bersinergi satu sama lainnya agar kurikulum yang sudah direncanakan berjalan dengan sangat baik walaupun hambatan akan selalu datang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari *study literature* mengenai analisis pandangan *commonplaces* kurikulum Joseph Schwab dalam pembelajaran PKn, dapat ditarik kesimpulan: [1] Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan, dan perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan sejalan dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. [2] Dalam pembuatan kurikulum menurut Schwab harus memperhatikan lima *commonplaces* yakni, guru, pembelajar (siswa), materi, konteks, dan pembuatan kurikulum. [3] Kurikulum PKn dikaji berdasarkan gagasan Schwab masih menghadapi hambatan dan tantangan dari setiap *commonplaces*, hal ini harus menjadi perhatian bagi pembuat kurikulum dan pelaksana kurikulum yang dalam hal ini adalah guru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Farisi, M Imam. (2012). *Desain dan Konten Kurikulum Pendidikan Dasar Berbasis Karakter untuk Generasi Bangsa 2045*. Konaspi VII Universitas Negeri Yogyakarta, 2012
- [2] Hergenhahn, B.R. & Olson, Matthew H. (2008). *Theories of Learning*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [3] Komalasari, Kokom. (2013). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama
- [4] Maftuh, B dan Sapriya. (2005). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pemetaan Konsep*. Jurnal Civicus 1, (5).
- [5] Null, W. (2011). *Curriculum from theory to practice*. United Kingdom: Rowman and Littlefield Publishing Group Inc.
- [6] Sanjaya, Wina. (2013). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- [7] Schwab, Joseph. (1969) *The Practical: A Language for Curriculum*. University of Chicago.
- [8] Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [9] Wahab, A. A & Sapriya (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta CV.
- [10] Winarno. (2014). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [11] Winataputra, Udin Saripudin & Budimansyah, Dasim (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- [12] Winataputra, Udin Saripudin (2012). *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [13], (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumen, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.